

**NILAI-NILAI
KEINDONESIAAN UMUM**
**Suatu Antisipasi terhadap Kecenderungan
Konvergensi Nasional**

Oleh Nurcholish Madjid

Pendahuluan

Setelah 40 tahun menjadi bangsa yang merdeka, patutlah rasanya kita menengok ke belakang dengan penuh apresiasi. Harus diakui bahwa tekanan kepada apresiasi itu mencerminkan suatu sikap pandang yang optimistis, namun kiranya sejalan dengan semangat penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa seperti diajarkan oleh agama-agama. Malah mungkin sikap itu bisa dibenarkan, karena kiranya ia mengandung “realisme yang cukup realis”, yaitu suatu realisme historis, yang tidak banyak mengizinkan adanya pengandaian atau penyesalan-penyesalan normatif berkenaan dengan masa lalu.

Dalam semangat realisme historis itu, kita ingin mengemukakan suatu pandangan bahwa sejarah bangsa kita, khususnya masa 40 tahun terakhir ini, telah lewat tanpa sia-sia. Karena itu, kita ingin menyatakan penghargaan kita kepada mereka semua yang telah secara positif ikut membina bangsa Indonesia. Dan jika masa 40 tahun terakhir itu kita bagi menjadi dua bagian yang kurang lebih sama masanya, yaitu “Orde Lama” dan “Orde Baru”, kiranya dibenarkan untuk menyatakan bahwa masing-masing masa itu,

dengan pola dan caranya sendiri, telah memberi sumbangan besar kepada usaha penumbuhan dan pengembangan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka “Orde Lama” dapat dinilai sebagai masa persiapan dan pengalaman yang akhirnya mengantarkan kita kepada konklusi tentang perlunya ditempuh jalan “Orde Baru”.

“Orde Lama”, dalam pandangan yang apresiatif itu, harus dilihat sebagai yang bertanggung jawab atas pertumbuhan modern bangsa Indonesia itu sendiri, yang kini terwujud dalam bentuk negara nasional yang meliputi wilayah Sabang-Merauke dengan konstitusi dan falsafah yang, secara formal, telah mapan dan mantap. Untuk itu sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada para bapak pendiri Republik, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, dua proklamator kemerdekaan kita, dan dua orang yang paling banyak berjasa dalam merumuskan berbagai nilai ideologi nasional kita.

“Orde Baru”, betapapun berbeda dengan “Orde Lama”, harus dipandang sebagai kelanjutan langsung masa sebelumnya itu. Ia lahir berkat pengalaman periode yang mendahuluinya, dan ia menjadi wujud penarikan manfaat dari pengalaman itu. Dan wujud penarikan manfaat dari pengalaman itu ialah peneguhan tekad untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Peneguhan tekad itu tidak terjadi tanpa “ongkos-ongkos” yang kadang-kadang cukup tinggi, seperti tekanan kepada “keamanan” yang sering disertai implikasi penekanan terhadap “kebebasan”, demikian pula pragmatisme pembangunan ekonomi yang berakibat untuk sementara, tentunya terdesaknya ke belakang usaha mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang justru dinyatakan dalam konstitusi sebagai tujuan kita bernegara. Tetapi, pengalaman memiliki stabilitas politik, keamanan nasional dan pembangunan ekonomi pragmatis, selama kurang lebih dasawarsa ini, haruslah dianggap sebagai sesuatu yang amat banyak memperkaya proses pertumbuhan kita sebagai bangsa.

Walaupun demikian, adalah suatu truisme yang sederhana jika kita katakan tentang tidak adanya sesuatu yang sempurna pada

“Orde Baru”. Bahkan, para partisipan “Orde Baru” paling apologetis pun tidak pernah terdengar menyatakan kesempurnaan masa dua dasawarsa terakhir kenegaraan kita ini. Dalam suatu perspektif perkembangan nasional yang menyeluruh, “Orde Baru” akan tampak sebagai masa persiapan pertumbuhan kebangsaan Indonesia lebih lanjut. Suatu kecenderungan umum, yang “Orde Baru” banyak memberikan saham untuk menumbuhkannya, ialah pertumbuhan ke arah konvergensi nasional pada tataran sosial-budaya.

Tinjauan Selintas tentang Nasionalisme

Sebelum meneruskan pembahasan tentang tema pokok makalah ini, ada baiknya kita mengingat kembali beberapa konsep dasar tentang nasionalisme atau paham kebangsaan. Dalam mendefinisikan perkataan “nasionalisme”, Stanley Benn menyebutkan, paling tidak, lima hal: (1) semangat ketaatan kepada suatu bangsa (semacam patriotisme); (2) dalam aplikasinya kepada politik, “nasionalisme” menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa sendiri itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain; (3) sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa, dan, karena itu; (4) doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa untuk dipertahankan; (5) nasionalisme adalah suatu teori politik, atau teori antropologi, yang menekankan bahwa umat manusia, secara alami, terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu.

Pengertian nasionalisme menurut angka-angka (4) dan (5), dalam formulasinya yang jelas, berasal dari pemikiran akhir abad kedelapan belas, meskipun bahan-bahan dan bibit-bibitnya telah ada pada umat manusia sejak masa lalu yang amat jauh. Sifat dasar dan kriteria nasionalitas dapat diberi batasan: (1) sebagai bentuk kenegaraan (nasionalitas identik dengan negara, Abbe Sieyes, 1789);

(2) sebagai kesatuan bahasa dan budaya (antara lain Fichte); (3) sebagai kesatuan warisan umum atau *common heritage* (dibantah oleh Ernest Renan, 1882); (4) sebagai kesatuan wilayah; (5) sebagai perwujudan adanya tujuan bersama (khususnya untuk kasus-kasus nasionalisme Asia dan Afrika yang umumnya tumbuh karena tujuan bersama untuk mengusir penjajah); dan (6) sebagai perwujudan upaya penentuan nasib sendiri (nasionalitas Palestina sebagai kasus paling mutakhir dan menonjol).¹

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tingkat perkembangannya sekarang ini, bangsa Indonesia telah tumbuh secara mantap sebagai “nasion”. Modal nasionalitas kita yang amat berharga ialah, seperti telah disinggung, keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara, sistem pemerintahan (administrasi, birokrasi) yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer selaku tulang punggung ketertiban dan keamanan, kemudian pengalaman pembangunan ekonomi secara pragmatis, meskipun yang terakhir ini masih jauh dari tujuan dasar bernegara. Dapat ditambahkan adanya pengalaman politik berwujud penerapan semacam pluralisme terbatas yang menjadi salah satu ciri sistem politik “Orde Baru”.

Kecenderungan Konvergensi Nasional

Telah ditegaskan bahwa pengalaman “Orde Baru” ini, bagaimanapun, tidak dapat dipandang sebagai hal yang final untuk pertumbuhan bangsa kita, dan memang tak seorang pun berpendapat demikian. Sebaliknya, pengalaman itu harus dipandang sebagai tidak lebih dari suatu fase yang mungkin secara historis mesti dilalui, disebabkan determinisme berbagai pengalaman historis itu sendiri dalam kombinasinya dengan kondisi lingkungan fisik bangsa kita.

¹ Lihat Paul Edwards, editor in chief, *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc. & The Free Press, Reprint 1972), s.v. Nationalism oleh Stanley I. Benn.

Dari sudut pandang itu, dan jika harus disebutkan sesuatu yang banyak memberi harapan masa depan kita, maka harus disebutkan adanya kecenderungan umum bangsa kita ke arah suatu konvergensi nasional, yakni konvergensi di bidang konsep-konsep dasar sosial, budaya dan politik harus diakui bahwa ungkapan ini pun bernada optimistis, seperti halnya dengan pandangan apresiatif kepada masa lalu bangsa kita sebagaimana disinggung di awal.

Namun, lepas dari nada optimistisnya, kita ingin mengajukan beberapa bahan argumen guna menopang pandangan itu. Konvergensi adalah suatu hasil bentuk saling pengertian, *mutual understanding*, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima. Memberi dan menerima itu sendiri, pada urutannya, berakar dalam kemantapan masing-masing kelompok kepada diri mereka sendiri, atau, secara negatifnya, timbul dari hilangnya berbagai kekhawatiran antarkelompok.

Pertanyaan cukup serius pun timbul: benarkah, pada tahap perkembangan sekarang ini, masing-masing pengelompokan intra-Indonesia telah menjadi semakin mantap kepada diri masing-masing sehingga terjadi perasaan aman dan saling memercayai dalam hubungan antarkelompok? Ini pun bisa dijawab secara optimistis, namun untuk tidak kehilangan realismenya, jawaban itu harus mengandung kenisbian secukupnya. Maksudnya, dibandingkan dengan masa-masa lalu, masa menjelang windu kelima kemerdekaan ini ditandai dengan secara nisbi semakin dimungkinkannya hubungan positif antarkelompok. Keadaan, tentu saja, belum seideal keinginan banyak dari kita, namun dari yang sedikit ada itu, kita berharap dapat mengembangkannya secara maksimal.

Perataan Beban dan Kesempatan

Perataan beban dan kesempatan di segala bidang, pada individu-individu dan kelompok-kelompok anggota bangsa, merupakan

salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial, sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara. “Orde Baru”, dengan segala kekurangannya yang serius ataupun yang ringan, menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Jika tidak dalam politik pluralisme terbatas terasa menjadi penghalang, dan jika tidak dalam bidang ekonomi (pragmatisme ekonomi tidak terlalu menopang), perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan. Dan dalam bidang pendidikan ini pun, jika tidak berlaku untuk semua lapisan masyarakat (kecenderungan elitis pendidikan karena sistem seleksi calon siswa/mahasiswa, baik seleksi menurut kemampuan akademis maupun finansial, semakin terasa tidak sejalan dengan prinsip keadilan pendidikan), dan kenyataan bahwa akses kepada pendidikan semakin banyak ditentukan secara meritokratis (berdasarkan kemampuan, baik akademis maupun ekonomis), dan bukan berdasarkan pertimbangan askriptif (faktor keturunan atau status orangtua seperti pada zaman kolonial), telah dihasilkan suatu perataan relatif pendidikan nasional kita. Disebabkan nilai strategis pendidikan dan keadaan berpendidikan (*being educated*), yaitu karena implikasinya yang besar sekali terhadap bidang-bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, maka perataan relatif pendidikan ini dapat dipandang sebagai penyumbang utama tumbuhnya kemantapan kelompok dan perseorangan anggota bangsa. Hal itu demikian keadaannya, meskipun masih dirasakan adanya berbagai kesenjangan, dalam bidang pendidikan ini, yang sangat mengganggu rasa keadilan.

Perolehan pendidikan tidak saja menunjang mobilitas horizontal, tetapi lebih penting lagi mobilitas vertikal. Memang, berbagai mobilitas itu sering menjadi sumber gangguan sosial karena dampaknya yang bisa mengancam kemapanan (*establishment*), baik dalam susunan horizontal maupun vertikal, tetapi hal itu adalah dampak sampingan. Secara menyeluruh, mobilitas itu harus dilihat sebagai bagian terpenting pertumbuhan nasional.

Kosmopolitisme, Bukan Nativisme

Kecenderungan konvergensi nasional itu harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang lebih kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional, dalam arti lahiriah maupun maknawiah, yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Ini mengingatkan bahwa, dalam kenyataannya, kebangsaan Indonesia disusun sebagai gabungan berbagai pengelompokan etnis yang sedemikian beragamnya, sehingga sesungguhnya, jika kita terapkan pada Benua Eropa, misalnya, masing-masing kelompok itu memenuhi beberapa kriteria untuk menjadi bangsa tersendiri (perbedaan antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda, misalnya, adalah kurang lebih sebanding saja dengan perbedaan antara bahasa Spanyol dan bahasa Portugis, dua bahasa dari dua bangsa yang berdiri sendiri). Jika disebutkan bahwa budaya Indonesia ialah rangkuman puncak berbagai budaya daerah, nilai keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitisme, bukan nativisme. Sebab, dalam kelanjutan wajarnya, nativisme akan hanya berakhir pada daerahisme, jika bukan sukuisme.

Dalam gabungannya dengan atavisme, suatu nativisme akan merupakan penghalang besar pertumbuhan keindonesiaan. Kebesaran bangsa pada masa lampau pada zaman nenek moyang, tentu tetap relevan untuk dikenang dan disadari, antara lain sebagai sumber inspirasi dan bahan penumbuhan rasa kesinambungan dan kelestarian historis. Tetapi, kebesaran bangsa sekarang tidak akan terwujud dengan terlalu banyak menengok ke belakang. Yang diperlukan ialah justru sikap yang lebih berani untuk menghadapi masa depan. Dan, untuk Indonesia pada tingkat sekarang, saat nilai keindonesiaan yang benar-benar diterima oleh seluruh anggota bangsa belum terwujud dengan kukuh, maka nativisme akan berakhir dengan penekanan makna penting pola budaya kelompok yang sedang berkuasa, dan itu berarti suatu sukuisme yang dinasionalisasikan. Ini tidak saja tidak adil terhadap suku-suku lain, tapi langsung berlawanan dengan ide semula kebangsaan kita, karena juga langsung mengancamnya.

Nilai-nilai keindonesiaan umum yang kosmopolit Indonesia itu dapat secara pasif dibiarkan tumbuh sendiri, yaitu antara lain karena nilai-nilai bisa merupakan hasil bersih interaksi pergaulan berbagai kelompok anggota bangsa Indonesia yang ditopang oleh adanya pemerataan kesempatan. Dari kelompok-kelompok itu, satu atau lebih kelompok yang mempunyai karakteristik kosmopolit, baik dalam kosmopolitisme mereka dalam pandangan hidup tradisional maupun modern, akan dengan sendirinya muncul dan tampil sebagai kelompok terpenting pengisi keindonesiaan, disebabkan posisinya selaku *common denominator* berbagai segmen nasional.

Akan tetapi, sikap pasif itu dapat dibenarkan jika ada asumsi yang berdasar bahwa pertumbuhan wajar keindonesiaan itu tidak akan terkena oleh usaha interupsi yang penuh kesengajaan (*deliberate*) misalnya, oleh bahaya laten komunisme yang sampai sekarang masih menjadi doktrin hankam kita. Karena itu, pertumbuhan keindonesiaan itu lebih baik ditangani secara aktif, serta *deliberate* pula, dan tidak diserahkan hanya semata-mata kepada perkembangan alaminya yang serba-aksidental.

Hal tersebut, dalam praktik, akan memerlukan dorongan ke arah terjadinya proses pendewasaan diri setiap anggota bangsa, baik perseorangan maupun kelompok, yang kedewasaan itu menyatakan diri dalam kemampuan, yang senantiasa meningkat, untuk mengenali nilai-nilai universal diri dan kelompoknya guna dikomunikasikan dengan orang dan kelompok lain. Dan ini berarti bahwa setiap orang atau kelompok dituntut untuk tidak terlalu terikat kepada simbol-simbol eksklusif diri atau kelompoknya, dan hendaknya pandangan dikembangkan ke arah yang lebih inklusivistis, berdasarkan kesadaran akan fungsi-fungsi sosial nilai-nilai di balik simbol-simbol formal itu. Jika suatu “kebenaran” yang diklaim oleh pribadi atau kelompok itu memang benar, dan tidak semata-mata hasil ilusi psikologis/sosial, yang kaitannya dengan manfaat umum hanya semu atau palsu bagaikan buih, dan jika kemanfaatan “kebenaran” itu untuk sesama manusia memang ber-alasan dan terbukti — setidaknya secara logis — “kebenaran” itu,

pada peringkat nasional, harus bisa dinyatakan dalam bahasa-bahasa yang inklusivitis, yang memungkinkan partisipasi dan *sharing* oleh orang atau kelompok lain.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Penumbuhan dan penemuan nilai-nilai keindonesiaan umum — yakni universal Indonesia yang mencakup seluruh segmen bangsa — itu akan mempunyai dampak strategis dalam pembangunan politik nasional kita, yaitu adanya sumber legitimasi kultural bagi kekuasaan yang ada. Legitimasi kekuasaan dapat diperoleh bagi berbagai sumber, sejak dari keberhasilan mewujudkan stabilitas (lahiriah) dalam suatu masyarakat yang baru mengalami situasi kacau sampai kepada kemampuan mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan bersama bangsa. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai luhur bangsa kita dirumuskan dalam konstitusi, yakni Pancasila. Dan sumber legitimasi inilah kriteria terakhir keabsahan suatu kekuasaan di negeri kita.

Legitimasi itu semakin diperlukan sebagai sumber daya dorong bangsa kita yang sering dilukiskan sebagai hendak “tinggal landas”. Sebagaimana disyaratkan dunia penerbangan yang menjadi sumber metafor itu sendiri, tenaga dorong yang diperlukan untuk tinggal landas adalah jauh lebih besar berlipat ganda daripada yang diperlukan ketika melakukan *taxiing* menuju *runway* dan masih lebih besar berlipat ganda dari tenaga dorong yang diperlukan untuk *cruising* kelak di angkasa. Maka, tanpa menjadi terlalu pesimistis, metafor penerbangan itu juga mengisyaratkan bahwa jika untuk tinggal landas itu tidak tersedia cukup sumber tenaga, pesawat mungkin akan menukik dan jatuh berantakan. Dalam kehidupan kenegaraan kita yang sedang membangun ini, hal yang paling tepat untuk dikiaskan dengan daya dorong guna *take off* itu ialah legitimasi politik. Semakin meyakinkan legitimasi itu, semakin besar daya dorong yang dihasilkannya, yaitu dalam wujud

kesediaan setiap anggota bangsa, perseorangan maupun kelompok, untuk berkorban. Sebab, anggota-anggota bangsa itu yakin bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena misalnya, tidak akan berakhir hanya pada pemenuhan nafsu kekuasaan para penguasa atau para penopangan keinginan memperkaya diri para pejabat.

Lebih lanjut, saat *take off*, sebagaimana saat *landing* (tapi malah mudahan *landing* tidak akan perlu kita pinjam sebagai metafor untuk bangsa kita!), adalah saat-saat paling kritis dalam penerbangan, saat seluruh penumpang, termasuk awak pesawat, dituntut untuk menahan diri (tidak merokok!) dan prihatin (mengenakan tali kursi!). Para awak pesawat, disebabkan oleh tanggung jawab mereka, harus memberi contoh. Jika tidak, kelalaian mereka akan menjadi alasan untuk para penumpang meniru-niru, dan ini akan bisa mengancam keselamatan seluruh isi pesawat. Penggunaan dunia penerbangan sebagai kiasan tahap perkembangan bangsa kita cukup beralasan, tapi juga menguatkan kita semua akan skema tanggung jawab nasional yang kita hadapi.

Untuk mempertinggi kemampuan kita memikul tanggung jawab itu, kita harus secara kreatif menumbuhkan sikap mantap kepada diri sendiri sebagai bangsa. Memang, pertumbuhan kemantapan itu berjalan sejajar dengan pertumbuhan keindonesiaan itu sendiri (termasuk keberhasilan mengembangkan sumber legitimasi kekuasaan tadi). Tetapi, kemantapan itu juga bisa ditumbuhkan secara *deliberate*, antara lain dengan menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kelima terbesar di dunia.

Kemantapan itu tidak saja berimplikasi kebebasan dari rasa cemas yang tidak pada tempatnya, baik cemas yang berlebihan terhadap pluralitas dalam negeri maupun cemas dalam bentuk *xenophobia*, suatu perasaan takut kepada yang asing atau pengaruh asing. Maka, kemantapan diharapkan menjadi pangkal bagi adanya fase pertumbuhan lebih lanjut yang lebih penting lagi, yaitu keterbukaan. Kita menginginkan pertumbuhan kebangsaan kita menjadi bangsa yang mantap kepada diri sendiri dan terbuka.

Maka, kembali kepada kemampuan mewujudkan nilai-nilai luhur atau keberhasilan menunjukkan komitmen kepadanya, sebagai sumber legitimasi politik tersebut, kemantapan dan keterbukaan itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai rumusan tentang cita-cita nasional yang tinggi itu, Pancasila tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selamanya. Pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif (terus-menerus membuat kemajuan) hanya terjadi jika dijiwai oleh semangat keterbukaan. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu, baik masing-masingnya secara terpisah maupun keseluruhannya secara utuh, jelas sekali mempunyai dimensi yang bersifat universal. Karena keuniversalnya itu, Pancasila tidak mungkin diwujudkan dengan semangat nativistis atau atavistik. Ia menghendaki kesediaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia untuk menimba dari pengalaman manusia sejagat.

Ideologi negara Pancasila, sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional, telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang Republik (sehingga ada persepsi yang terdengar agak magis kepadanya, seperti ungkapan “kesaktian Pancasila”). Tapi, keefektifannya itu agaknya terbatas kepada kemampuannya untuk menjadi sumber legitimasi bagi usaha-usaha mempertahankan *status quo*. Bahkan, di tangan penguasa atau pejabat yang tidak kreatif, Pancasila sering berfungsi sebagai alat pengenalan diri yang dangkal (ingat, “sepak bola Pancasila”), atau sebagai pemukul orang atau kelompok lain yang kebetulan “tidak berkenan di hati”. Karena itu, Pancasila di tangan bangsa yang belum mantap pertumbuhannya akan tetap rawan terhadap berbagai manipulasi. Kenyataan bahwa Orde Lama, termasuk fase-fase terakhirnya yang amat berbahaya itu, juga mengaku sepenuhnya berpegang kepada Pancasila, secara demonstratif menunjukkan kemungkinan manipulasi itu. Sebagai obyek manipulasi, Pancasila bisa berfungsi tidak lebih daripada suatu alat politik, suatu *ideological weapon* untuk kepentingan sesaat.

Sedangkan yang amat kita perlukan sekarang ialah Pancasila yang berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Pemfungsian (atau, lebih tepatnya, “penyalahfungsian”) Pancasila seperti itu adalah akibat persepsi yang reaktif terhadap Pancasila. Dengan persepsi reaktif itu kita lebih tahu tentang apa yang bukan Pancasila, namun tidak, atau sedikit sekali, mengetahui tentang apa yang Pancasila. Apalagi karena acapkali kita beringsut ke belakang dengan segala sikap apologetisnya, saat kita hendak membicarakan perwujudan nyata dalam masyarakat untuk sila-sila Perikemanusiaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan diri terus-menerus bersikap “tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan” terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Karena itu, diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila itu, yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan “pengusutan” kepada keadaan sekarang. Di sini berarti dikehendakinya adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ke sanalah muara konvergensi nasional kita, nilai keindonesiaan kita. [❖]